



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 05 Juli 2019

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

PERKARA A QUO

Jalan Merdeka Barat No. 5

Di -

JAKARTA.

ASLI

DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR	92.19.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.22

Perihal : PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN 2019.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMEN AME, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :**PIHAK TERKAIT;**

Adapun dasar - dasar dan / atau alasan – alasan mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi :
 - (2). Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum** ;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;

6. Bahwa Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT ini kami ajukan secara kolektif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK / Provinsi / Kabupaten / Kota. Adapun nama-nama Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT yang di wakili oleh Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP PD) antara lain :
 1. PROVINSI ACEH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 6, NO. URUT 2, ATAS NAMA **MUHAMMAT YUNUS**, NO. PERKARA: 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
 2. PROVINSI ACEH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA PIDIE JAYA DAPIL 3, NO. URUT 1, ATAS NAMA **TEUKU GUNTARA**, NO. PERKARA: 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
 3. PROVINSI BANTEN, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 1, NO. URUT 1, ATAS NAMA **RIZKI NATAKUSUMAH**, NO. PERKARA: 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
 4. PROVINSI DKI JAKARTA, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 2, NO. URUT 1, ATAS NAMA **HJ. MELANI LEIMANA SUHARLI**, NO. PERKARA: 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
 5. PROVINSI DKI JAKARTA, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 2, NO. URUT 2, ATAS NAMA **HJ. NENENG HASANAH**, NO. PERKARA: 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

6. PROVINSI JAWA BARAT, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 4, NO. URUT 1, ATAS NAMA **H. MOHAMAD MURAZ**, NO. PERKARA: 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
7. PROVINSI JAWA BARAT, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 9, NO. URUT 1, ATAS NAMA **HM. ACHDAR** NO. PERKARA: 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
8. PROVINSI JAWA TENGAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 3, NO. URUT 2, ATAS NAMA **HARMUSA OKTAVIANI**, NO. PERKARA: 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
9. PROVINSI JAWA TENGAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 6, NO. URUT 2, ATAS NAMA **BRAMANTYO SUWONDO**, NO. PERKARA: 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, NO. PERKARA: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, NO. PERKARA: 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
10. PROVINSI JAWA TENGAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA MAGELANG DAPIL 3, NO. URUT 1, ATAS NAMA **DIAN MEGA**, NO. PERKARA: 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
11. PROVINSI JAWA TIMUR, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 1, NO. URUT 1, ATAS NAMA **DRA. LUCY KURNIASARI**, NO. PERKARA: 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
12. PROVINSI JAWA TIMUR, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA JOMBANG DAPIL 1, NO. URUT 1, ATAS NAMA **DIAN AYUNITA PRASSTUMI**, NO. PERKARA: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
13. PROVINSI JAWA TIMUR, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROVINSI DAPIL IV NO. URUT 1, ATAS NAMA **AGUNG MULYONO, dr**, NO. PERKARA: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
14. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA KAPUAS DAPIL 2, NO. URUT 4, ATAS NAMA **LINDAWATI**, NO. PERKARA: 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

15. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA KAPUAS DAPIL 7, NO. URUT 4, ATAS NAMA **H. PARIJ ISMETH RINJANI, SH**, NO. PERKARA: 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
16. PROVINSI MALUKU UTARA, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 2, NO. URUT 1, ATAS NAMA **DJASMIN RAINU.S**, NO. PERKARA: 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ;
17. PROVINSI PAPUA, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 2, NO. URUT 5, ATAS NAMA **BENYAMIN ARISOY**, NO. PERKARA: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
18. PROVINSI PAPUA, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA MAMBERAMO TENGAH DAPIL 3, NO. URUT 1, ATAS NAMA **HENGKY D. YIKWA**, NO. PERKARA: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
19. PROVINSI PAPUA BARAT, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR PROVINSI DAPIL 1, NO. URUT 2, ATAS NAMA **IR. YOHANIS EDONG RUMISSING**, NO. PERKARA: 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
20. PROVINSI SULAWESI BARAT, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 1, NO. URUT 1, ATAS NAMA **DR. H. SUHARDI DUKA**, NO. PERKARA: 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
21. PROVINSI SULAWESI SELATAN, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI DAPIL 3, NO. URUT 7, ATAS NAMA **MUH. DHEVY BIJAK**, NO PERKARA: 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
22. PROVINSI SULAWESI SELATAN, CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN/KOTA SELAYAR DAPIL 5, NO. URUT 1, ATAS NAMA **MISWAR WAHYUDI NASIR LEHA, SE**, NO PERKARA: 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perkenan, perhatian dan di kabulkan nya permohonan kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.


PANGIHUTAN B. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.


ROMY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.